

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. In News.Ge. Syakir Media Press. Amalia Yunia Rahmawati. (2020). Konsep dinamika politik. July, 1–23.
- B. Kotten, Nasir, Bawaslu Tidak Lagi Ompong. Malang: Media Nusa Creative, 2020
- Dwiyanto. (2017). Dinamika politik dalam reformasi administrasi publik. *Kajian Ilmu Sosial*, 2(1), 24–40.
- Haboddin, Muhtar, Dinamika Pilkada dan Demokrasi di Indonesia. Malang: UB Press, 2016.
- Junaidi, Veri. (2013). Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.
- Kartabrata, Absar. Penegakan Hukum Dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), PASCONCERN BANDUNG. 2020
- Maria, L., & Marendra, D. (2020). Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi. In Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.
- Romli, Lili. Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Sri Yanuarti, Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu; Studi Kasus Jawa Tengah. Buku Laporan Penelitian LIPI dengan Balitbang Departemen Dalam negeri, Jakarta: PsP LIPI, 2004.
- Surbakti, Ramlan., & Supriyanto, Didik. (2013). Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

B. Jurnal

- Amalia, L. S., Darmawan, D., Nuryanti, S., Nugroho, A. E., Romli, L., & Kartini, I. (2021). Dinamika Sosial Politik Pemilu Serentak 2019. In *Dinamika Sosial Politik Pemilu Serentak 2019*. <https://doi.org/10.14203/press.332>
- Andiraharja, D. G. (2020). Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu.
- Khoiriyah, F., & Syarifudin, A. (2018). ketentuan pidana pemilihan umum Pola Penanganan, Norma, dan Unsur Pidana Pemilu.

- Muhadam, L., & Teguh, I. (2015). Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia. Pt Rajagrafindo Persada, 1, 269.
- Prodjodikoro, W. (2009). PELANGGARAN TINDAK PIDANA. *Journal Information*, 10(3), 1–16
- Ridhanie, A. (2019). Implementasi hukum progresif dan penerapan pasal 55 kuhp dalam penanganan perkara pidana di kalimantan selatan. *Bawaslu Kalimantan Selatan*. <https://kalsel.bawaslu.go.id/>
- Rosa, R. (2009). Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dalam Kerangka Sistem Pemerintahan Presidensiil. *Jurnal Konstitusi*, 2, 1–171. <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>
- Santoso, T. (2006). Penegakan Hukum Pemilu. *Prioris*, 4(3), 348–364.
- Studi, P., Hukum, I., Ilmu, F., Dan, S., & Batam, U. P. (2021). Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. 2019.
- Sri Rahayu, L. (2019). Bawaslu Temukan 15 Ribu Pelanggaran Pemilu. *Detik.Com*. <https://news.detik.com/berita/d-4568789/hingga-28-mei-bawaslu-temukan-15-ribu-pelanggaran-pemilu>
- Tindak, P., & Pemilu, P. (2023). KONSEP PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA. 7(1), 52–64.
- Tricahyono. (2009). Reformasi Pemilihan Umum. *Jurnal Politik Indonesia*, 13. repository.unair.ac.id

C. Website

- Aziz, A., Widodo, B. E. C., Haris, S., & Wirnyaningsih. (2019). Refleksi Pemilu Serentak di Indonesia. 186. www.bawaslu.go.id
- Budiono, E. (2021). Bawaslu: Batas Waktu Penanganan Pelanggaran Pemilu. *Info Publik*. <https://infopublik.id>
- NTB, B. P. P. (2023). Alur Penanganan Pelanggaran Pemilihan. ntb.bawaslu.go.id

D. Undang-Undang

- Pemerintah Indonesia. (2022). Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. 1–73.